



# Tantangan DPR RI dalam Partisipasi Publik dan Keterbukaan Parlemen

Oleh Johan Budi S.P., Anggota Tim Open Parliament Indonesia (OPI)  
Open Government Week, 19 Mei 2021

# Aksi Protes Publik Terhadap Produk Undang-Undang



## Persepsi Publik → Keterbukaan Parlemen

- ❑ Protes/demo masif yang terjadi di berbagai belahan Indonesia saat pengesahan sebuah Undang-undang dianggap/persepsikan publik dilakukan secara tiba-tiba
- ❑ Masyarakat menganggap tidak ada transparansi dalam proses pembuatan undang-undang
- ❑ Literasi politik masyarakat, terutama soal memanfaatkan keterbukaan yang ada, masih rendah
- ❑ Ketersediaan (availability) data dan informasi dan kualitas keterbukaan (quality openness) yang menguatkan mekanisme demokrasi antara warga negara dengan DPR (Juga Pemerintah) rendah



# Pentingnya Keterbukaan Parlemen

- **Open Parliament Indonesia (OPI)** mendukung proses kerja lembaga legislatif menjadi terbuka, transparan, inklusif, dan akuntabel sehingga perumusan kebijakan dan kinerja Anggota Dewan dapat diakses dan menjawab kebutuhan publik.
- **Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap DPR RI rendah:**
  - Survei dari Lembaga Survei Indonesia tahun 2019: 45%
  - Survei dari Survei Indikator Politik Indonesia tahun 2020: 52,6%
- **Peringkat Keterbukaan Informasi DPR RI** berdasarkan penilaian Komisi Informasi Pusat (KIP) turun dari **CUKUP INFORMATIF (2019)** menjadi **MENUJU INFORMATIF (2020)**

**Anggota Tim OPI**

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Johan Budi S. Pribowo</b><br>Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | <br><b>Dyah Roro Esti</b><br>Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar)    | <br><b>Sugiono</b><br>Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)              |
| <br><b>Kresna Dewanata Phrosakh</b><br>Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem)         | <br><b>Anggia Erma Rini</b><br>Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | <br><b>H. Irwan</b><br>Fraksi Partai Demokrat                                      |
| <br><b>Ledia Hanifa Amaliah</b><br>Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)              | <br><b>H. Jon Erizal</b><br>Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)      | <br><b>H. Muhamad Arwani Thomafi</b><br>Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) |



# Pengawasan Publik Terhadap Penyusunan Undang-Undang

## RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

dpr.go.id/uu/detail/id/318

Menu Pencarian Webmail Kontak PPID TV Parlemen Layanan EN ID

Home / RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

### RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Diusulkan Pada : 17 Desember 2019 Disiapkan oleh : DPR

Progres RUU :

Agenda Terakhir

- Rapat Bales dalam raneka Pengambilan Keputusan/PAF atas hasil ee... 01 Juli 2020
- Penjelasan Tim Ahli atas draf RUU tentang Perlindungan Pekerja Rum... 25 Juni 2020

## RUU tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

dpr.go.id/uu/detail/id/294

Menu Pencarian Webmail Kontak PPID TV Parlemen Layanan EN ID

Home / RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

### RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Diusulkan Pada : 17 Desember 2019 Disiapkan oleh : DPR

Progres RUU :

Agenda Terakhir

- KRONOLOGIS PROSES PENYUSUNAN HINGGA PEMRAHASAN R... 15 Mei 2020
- Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pertamba... 12 Mei 2020

# Pengawasan Publik Terhadap Penyusunan Undang-Undang

## Prolegnas 2020 - 2024

URL: <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>

| No | Posisi | Judul RUU                                                                      | Pengusul | Tanggal Update |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 1  |        | RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber                                       | DPR      | 17 Mei 2021    |
| 2  |        | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran | DPR      | 17 Mei 2021    |
| 3  |        | RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia                                  | DPR      | 17 Mei 2021    |
| 4  |        | RUU tentang Keamanan Laut                                                      | DPR      | 17 Mei 2021    |
| 5  |        | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan | DPR      | 17 Mei 2021    |
| 6  |        | RUU tentang Tugas Perbantuan Militer                                           | DPR      | 17 Mei 2021    |

Prolegnas 2020-2024 Progress: 227 Terdaftar, 5 Penyusunan, 7 Harmonisasi, 5 Penetapan Usul, 1 Pembahasan, 0 Keputusan, 3 Selesai.

<https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>

## Prolegnas Prioritas

URL: <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>

| No | Posisi | Judul RUU                                                                                                               | Pengusul        | Tanggal Update |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1  |        | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran                                          | DPR             | 17 Mei 2021    |
| 2  |        | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia                       | DPR, PEMERINTAH | 17 Mei 2021    |
| 3  |        | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya | DPR             | 17 Mei 2021    |
| 4  |        | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan                                              | DPR             | 17 Mei 2021    |
| 5  |        | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara                           | DPR             | 17 Mei 2021    |
| 6  |        | RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan                                                                                  | DPR             | 17 Mei 2021    |

Prolegnas 2020-2024 Progress: 18 Terdaftar, 4 Penyusunan, 5 Harmonisasi, 5 Penetapan Usul, 1 Pembahasan, 0 Keputusan, 0 Selesai.

<https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>



# Landasan Hukum Keterbukaan Parlemen

- **Pasal 28F UUD 1945** “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
- **Pasal 23 ayat 1 UUD 45** telah ditetapkan bahwa “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
- **UU Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur penyediaan informasi oleh badan publik.
- **Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2010** tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI tentang keterbukaan Informasi Publik di DPR RI.

Dalam pelaksanaan, landasan hukum OPI juga di dukung dari keanggotaan Indonesia dalam *Inter Parliamentary Union (IPU)*, *Global Organization for Parliamentary Against Corruption (GOPAC)* dan *Open Government Partnership (OGP)*.



# Tantangan DPR RI Dalam Keterbukaan Parlemen

*Peningkatan Political Will*

Isu-isu Ego Sektoral dan Birokrasi

Pengembangan Sistem Teknologi informasi di DPR RI

Transisi politik dan pergantian kepemimpinan

Minimnya anggaran (akibat Pandemi)



# Tantangan DPR RI dalam Partisipasi Publik

Komunikasi antara Anggota DPR RI dan Masyarakat

Reformasi citra DPR RI

*Rendahnya user engagement* atau pemanfaatan fasilitas teknologi dan informasi yang dimiliki oleh DPR RI





# Upaya DPR RI Mendorong Partisipasi Publik dan Keterbukaan Parlemen

# Meningkatkan Komunikasi Antara Anggota DPR RI dengan Publik

dpr.go.id/anggota/index/

Menu Pencarian Webmail Kontak PPID TVR Parlemen Layanan EN

Periode 2019 - 2024 PERIODE 2019 - 2024



Fraksi Alat Kelengkapan Dewan Dapil

10

| No. Anggota | NAMA/FRAKSI/DAPIL                                                                                                                                                 | AKD                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1           | <br>H. IRMAWAN, S.Sos., M.M.<br>Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa<br>ACEH I       | Komisi V<br>Panitia Khusus    |
| 2           | <br>RUSLAN M. DAUD<br>Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa<br>ACEH II                | Komisi V<br>Panitia Khusus    |
| 3           | <br>H. MARWAN DASOPANG<br>Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa<br>SUMATERA UTARA II | Komisi VIII<br>Panitia Khusus |

Upaya peningkatan komunikasi antara anggota DPR RI dengan publik dilakukan melalui:

- Meningkatkan transparansi informasi Anggota DPR
- Informasi mengenai Anggota DPR RI bisa dilihat pada <http://www.dpr.go.id/anggota/index/>
- Mengupayakan saluran penghubung langsung antara masyarakat dengan wakilnya sesuai dengan komitmen ke-3 Rencana Aksi Nasional (RAN) Keterbukaan Parlemen Indonesia Tahun 2020 - 2022

# Komunikasi Antara Anggota DPR RI dengan Publik



The screenshot shows a news profile page for Johan Budi Sapto Prabowo on the VIVA website. The page includes a navigation bar with categories like NEWS, TREND, RAMADAN, BOLA, SPORT, SHOWBIZ, LIFESTYLE, OTOMOTIF, DIGITAL, RAGAM, MILITER, NETIZEN, INSIGHT, and INDEKS. The profile section features a photo of Johan Budi Sapto Prabowo, his name, and a quote: "modus korupsi makin canggih" attributed to him. Below the profile, there are sections for "PROFIL TOKOH" and "Riwayat" (Biography). The biography text reads: "Kecintaannya pada dunia tulis menulis, mengantarkannya menjadi wartawan meskipun sudah bekerja di pusat penelitian minyak dan gas. Tak puas dengan profesi jurnalis, ia mendaftarkan diri di KPK. Puncaknya ia menjadi pimpinan salah satu pimpinan KPK. Setelah tak lagi di KPK, ia kembali bersentuhan dengan media. Presiden Joko Widodo meminta Johan Budi untuk menjadi juru bicara presiden. Johan resmi menjadi Staf Khusus dengan tugas sebagai juru bicara Presiden pada Selasa, 12 Januari 2016. 'Saya siap bantu jadi jubir presiden,' jelas pria kelahiran 29 Januari 1967 ini."

Upaya meningkatkan komunikasi dengan publik:

- Memaksimalkan penggunaan **sosial media** dan **media baru (*new media*)**
- Membangun komunikasi, kedekatan, keterbukaan dan keterikatan yang konstruktif dan berkelanjutan antara Anggota DPR RI dengan publik



# Mendorong Proses Ko-Kreasi Antara DPR RI dengan Stakeholder Non Parlemen



- Proses ko-kreasi dan kolaborasi antara DPR RI dengan berbagai stakeholder Non Parlemen adalah jantung dari proses keterbukaan parlemen
- Meningkatkan fungsi berbagai saluran komunikasi yang dimiliki oleh DPR RI baik secara *on line* maupun *off line* untuk meningkatkan partisipasi publik
- Merancang forum yang lebih inklusif dan partisipatif sesuai dengan komitmen ke-4 Rencana Aksi Nasional (RAN) Keterbukaan Parlemen Indonesia Tahun 2020 - 2022

# Kolaborasi dengan Media Massa



- Meningkatkan kolaborasi antara DPR RI dengan media massa dan media baru untuk meliput inovasi DPR RI terutama cara kerja dan pelayanan kepada publik
- Meningkatkan keterlibatan media massa dan media baru untuk mempromosikan berbagai aplikasi dan platform keterbukaan parlemen kepada publik
- DPR RI mengupayakan kolaborasi yang lebih luas dengan media massa dan media baru guna meningkatkan keterbukaan dan partisipasi publik sesuai dengan komitmen ke-5 Rencana Aksi Nasional (RAN) Keterbukaan Parlemen Indonesia



Terima Kasih